

PENERBITAN KEPMENDAGRI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA/WAKIL WALI
KOTA

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>PENGANGKATAN</p> <p>A. Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Hasil Pilkada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan); 2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Periode Sebelumnya; 3. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota (Dalam Hal Daerah Dipimpin Oleh Penjabat); 4. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Periode Sebelumnya; 5. Keputusan KPU Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 6. Keputusan KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih; 7. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Terdapat Gugatan); 9. Surat Mahkamah Konstitusi RI Mengenai Tidak Terdaftaranya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Tidak Terdapat Gugatan); 10. Surat KPU RI Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi RI (Apabila Tidak Terdapat Gugatan); 11. Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Oleh KPU Kabupaten/Kota Kepada DPRD Kabupaten/Kota; 12. Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Oleh DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan 13. Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri. |

- | | |
|--|---|
| | <p>B. Pengaktifan Kembali Bupati/Wakil Bupati Atau Walikota/Wakil Walikota</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Yang Bersangkutan;3. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Yang Bersangkutan;4. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; dan5. Surat Usulan Pengaktifan Kembali Oleh Gubernur Kepada Mendagri. <p>C. Pengangkatan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota Hasil Pemilihan DPRD (Pengisian Kekosongan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Wakil Bupati Atau Wakil Walikota Sebelumnya;3. Surat Usulan Parpol/Gabungan Parpol Pengusung (Kesepakatan Bersama Parpol/Gabungan Parpol Pengusung Tingkat DPP), Yang Mengusulkan 2 (Dua) Orang Calon Wakil Bupati Atau Wakil Walikota Kepada DPRD Kabupaten/Kota Melalui Bupati/ Walikota (Jika Calon Berasal Dari Parpol Atau Gabungan Parpol);4. Surat Usulan Bupati/Walikota, Yang Mengusulkan 2 (Dua) Orang Calon Wakil Bupati Atau Wakil Walikota Kepada DPRD Kabupaten/Kota (Jika Berasal Dari Calon Perseorangan);5. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota;6. Berita Acara DPRD Kabupaten/Kota Tentang Hasil Pemilihan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota;7. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Tentang Hasil Pemilihan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota;8. Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota Yang Mengatur Mekanisme Pemilihan Wakil Bupati Atau Wakil Walikota;9. Surat Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan10. Surat Usulan Gubernur Kepada Mendagri. <p>D. Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Hasil Pemilihan DPRD (Pengisian Kekosongan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan); |
|--|---|

2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebelumnya;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota (Dalam Hal Daerah Dipimpin Oleh Penjabat);
4. Surat Usulan Parpol/Gabungan Parpol Pengusung (Kesepakatan Bersama Parpol/Gabungan Parpol Pengusung Tingkat DPP) Yang Masih Memiliki Kursi Di DPRD, Dengan Mengusulkan 2 (Dua) Pasangan Calon Kepada DPRD Kabupaten/Kota;
5. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara DPRD Kabupaten/Kota Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota Yang Mengatur Mekanisme Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
10. Surat Usulan Gubernur Kepada Mendagri.

E. Pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menjadi Bupati/Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Bupati Atau Walikota;
4. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menjadi Bupati/Walikota;
5. Berita Acara DPRD Kabupaten/Kota Tentang Pengumuman Pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menjadi Bupati/Walikota;
6. Surat Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
7. Surat Usulan Gubernur Kepada Mendagri.

F. Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);

2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Periode Sebelumnya;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Periode Sebelumnya;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Periode Sebelumnya(Dalam Hal Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Telah Disahkan Pemberhentiannya Sebelum Usulan Pengangkatan Penjabat Disampaikan);
5. Daftar Riwayat Hidup 3 (Tiga) Orang Calon Penjabat;
6. Sasaran Kinerja Pegawai 3 (Tiga) Orang Calon Penjabat Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir; dan
7. Surat Usulan Pengangkatan Penjabat Bupati Atau Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

G. Penunjukan Penjabat Sementara (PJS) Bupati/Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Fotokopi Surat Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
5. Daftar Riwayat Hidup 3 (Tiga) Orang Calon PJS;
6. Sasaran Kinerja Pegawai 3 (Tiga) Orang Calon PJS Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir; dan
7. Surat Usulan Penunjukan Penjabat Sementara Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

H. Usulan Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Sekretaris DPRD;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Dan/Atau Penjabat Bupati/Walikota Periode Sebelumnya;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Dan/Atau Penjabat Bupati/Walikota Periode Sebelumnya;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Periode

Sebelumnya (Dalam Hal Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Telah Disahkan Pemberhentiannya Sebelum Usulan Pengangkatan Penjabat Dan Disampaikan Dengan Surat Keterangan Sekretaris Dprd);

5. Daftar Riwayat Hidup Dengan Riwayat Pendidikan Dan Jabatan 3 (Tiga) Orang Calon Penjabat Yang Dilengkapi Dengan Ktp Dan Pas Photo Berwarna; dan
6. Surat Usulan Dari Ketua Dprd Kabupaten/Kota.

PEMBERHENTIAN

A. Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Berakhir Masa Jabatan

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Berakhir Masa Jabatannya;
5. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
6. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

B. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Meninggal Dunia

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Akta Kematian Dari Pejabat Berwenang;

5. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Meninggal Dunia;
6. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
7. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

C. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Permintaan Sendiri (Mengundurkan Diri)

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Disertai Dengan Alasan Yang Jelas;
5. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Permintaan Sendiri;
6. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
7. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

D. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau

Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;

3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Surat Keterangan Dokter Yang Berwenang;
5. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota;
6. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
7. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

E. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji; Tidak Melaksanakan Kewajiban; Melanggar Larangan; Atau Melakukan Perbuatan Tercela

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota;
5. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Tentang Pendapat DPRD;
6. Salinan Putusan Mahkamah Agung Atas Pendapat DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Setempat Yang Menyatakan Tidak Adanya Gugatan Dari Yang Bersangkutan Terhadap Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Dan/Atau Putusan Mahkamah Agung (Dalam Hal Tidak Adanya Gugatan);
8. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Dalam Hal Adanya Gugatan Dari Yang Bersangkutan Terhadap Keputusan DPRD

Kabupaten/Kota Dan/Atau Putusan Mahkamah Agung);

9. Surat Usulan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan

10. Surat Usulan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

F. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Diberi Tugas Dalam Jabatan Tertentu Oleh Presiden

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);

2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;

3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;

4. Keputusan Presiden RI Tentang Pengangkatan Yang Bersangkutan Dalam Jabatan Tertentu;

5. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota;

6. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan

7. Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

G. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Terorisme; Makar; Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara; Dan/Atau Perbuatan Lain Yang Dapat Memecah Belah NKRI

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);

2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;

3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
5. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
6. Surat Keterangan Pengadilan Terkait Tanggal Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; dan
7. Surat Usulan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

H. Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Karena Terbukti Menggunakan Dokumen Dan/Atau Keterangan Palsu Sebagai Persyaratan Pada Saat Pencalonan

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota;
5. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Tentang Hasil Penyelidikan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Setempat Yang Menyatakan Tidak Adanya Gugatan Dari Yang Bersangkutan Terhadap Keputusan DPRD Kabupaten/Kota (Dalam Hal Tidak Adanya Gugatan);
7. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap(Dalam Hal Adanya Gugatan Dari Yang Bersangkutan Terhadap Keputusan DPRD Kabupaten/Kota);
8. Surat Usulan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Mendagri Melalui Gubernur; dan
9. Surat Usulan Pemberhentian Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

I. Pemberhentian Sementara Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Yang Bersangkutan;
4. Surat Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan/Surat Keterangan Dari Pengadilan Yang Menerangkan Tanggal Status Terdakwa;
5. Nomor Register Perkara Pengadilan Negeri; dan
6. Surat Usulan Pemberhentian Sementara Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

J. Pemberhentian Pejabat Bupati/Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Atau Walikota; dan
3. Surat Usulan Pemberhentian Pejabat Bupati Atau Walikota Oleh Gubernur Kepada Mendagri.

K. Pemberhentian Pejabat Sementara (PJS) Bupati/Walikota

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati/Walikota; dan
3. Surat Usulan Pemberhentian Pejabat Sementara Oleh Gubernur Kepada Mendagri File Scan Data Dukung Penting Lainnya.

PERUBAHAN NAMA/GELAR

A. Perubahan Nama

1. Surat Pengantar Gubernur;
2. Surat Keterangan Biro Pemerintahan terkait Keaslian Dokumen;
3. Akta Lahir; dan
4. Surat Keterangan Pengadilan terkait Perubahan Nama (Opsional).

B. Perubahan Gelar

1. Surat Pengantar Gubernur;
2. Surat Keterangan Biro Pemerintahan terkait Keaslian Dokumen; dan
3. Scan Ijazah Asli.
- 4.

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 20 (dua puluh) hari kerja. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/gratis. |
| 5. | Produk Pelayanan | Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Oula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan. |

